

Judul : Tunggu kajian DJSN, senayan belum setuju kenaikan iuran BPJS
Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tunggu Kajian DJSN

Senayan Belum Setujui Kenaikan Iuran BPJS

RENCANA Pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap mulai 2026, belum mendapatkan persetujuan DPR. Kebijakan strategis tersebut harus dikaji mendalam dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan, pihaknya belum menyetujui rencana yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

"Rencana kenaikan iuran ini memang diarahkan untuk peserta mandiri yang tergolong mampu. Namun jangan melupakan kelompok setengah mampu yang justru akan paling terdampak," tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah memang telah mengalokasikan tambahan dana Rp 10 triliun untuk menyesuaikan kenaikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta Rp 10 triliun sebagai dana cadangan. Namun, hal itu tidak otomatis menjadi

alasan untuk menaikkan tarif iuran peserta mandiri.

Selain itu, Irma menyoroti sejumlah persoalan seperti efisiensi transfer daerah yang berpotensi menyulitkan pemerintah daerah dalam membayar iuran warganya. Dia menyinggung kasus PBI yang dinonaktifkan mendadak tanpa alasan maupun pemberitahuan yang jelas.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, mesti berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk memverifikasi data warga miskin secara akurat.

"Tujuannya agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses layanan," ujarnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menegaskan, rencana kenaikan iuran belum bisa dilaksanakan tanpa pembahasan mendalam di parlemen. Komisi IX berencana memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk meminta penjelasan lebih detail.

"Pertemuan sedianya dijadwalkan hari ini, Selasa (26/8/2025),



IRMA SURIYANI CHANIAGO

tapi ditunda karena Menkes dan Dirut BPJS berhalangan hadir," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Dia menilai, meski ruang diskusi terbuka, keputusan soal kenaikan iuran harus memastikan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan. Palsanya, banyak tantangan yang dihadapi, seperti rasio klaim yang mencapai 110

persen, inflasi kesehatan yang terus naik, dan evaluasi iuran yang seharusnya dilakukan dua tahun sekali tetapi belum ditinjau ulang sejak empat tahun terakhir.

Edy menegaskan, pihaknya akan menunggu hasil kajian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebelum mengambil keputusan.

"Dari situlah kita akan cari solusi terbaik soal iuran BPJS

Kesehatan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyesuaian iuran BPJS Kesehatan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan JKN.

"Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar," ujar Sri dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (21/8/2025).

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Pemerintah merencanakan kenaikan iuran dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal negara. Penyesuaian iuran akan dilakukan secara bertahap.

Diketahui, iuran BPJS Kesehatan terakhir kali naik pada 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020. Besaran iuran saat ini adalah Rp 150 ribu per bulan untuk Kelas I, Rp 100 ribu untuk Kelas II dan Rp 42 ribu untuk Kelas III.

Untuk Kelas III, peserta hanya membayar Rp 35 ribu per bulan setelah mendapat subsidi Pemerintah sebesar Rp 7 ribu. ■ PYB